

## **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN CLASS ACTION**

**MUHAMMAD EDWARD PONTOH / D 101 10 530**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action, dengan identifikasi masalah bagaimana kedudukan hukum gugatan class action dalam perkara lingkungan di Indonesia dan bagaimana permasalahan prosedur gugatan class action di dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini mengetahui kedudukan hukum gugatan class action dan permasalahan prosedur gugatan class action. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dikarenakan sasaran penelitian adalah hukum atau kaedah (norma). Penelitian yuridis normatif itu sendiri dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan.*

*Dari hasil penelitian, dapat yang disimpulkan yang pertama dalam UUPH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“onrechtmatigedaad”). Serta yang kedua permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur class action ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur class action. Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun 2002 terhadap beberapa kasus class action yang sedang atau dalam proses di pengadilan sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktek gugatan class action di pengadilan di Indonesia*

**Kata Kunci : Sengketa Lingkungan, Gugatan Class Action**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sengketa lingkungan hidup yang dimaksud dalam pengajuan gugatan Class Action merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau di duga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Di Amerika Serikat “class action” diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Sengketa lingkungan (“environmental disputes”) merupakan “special” dari “genus” sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan. Dalam sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi “perselisihan para pihak saja, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan” (claim). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik).

Perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya jika melawan kewajiban hukum tertulis, tetapi juga jika melanggar itikad baik yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup> Sehubungan dengan adanya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya, salah satu instrumen yang dapat dilakukan melalui penerapan sanksi hukum, seperti sanksi hukum administrasi, sanksi perdata (tanggung jawab perdata) serta sanksi pidana. Kewajiban membayar kerugian ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang dikembangkan dalam hukum lingkungan.

Pemerintah maupun masyarakat yang tidak merasakan secara langsung terhadap akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup secara proaktif juga dapat mengajukan gugatan atau meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak

---

<sup>1</sup> Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Binacipta, Bandung, 1991, hlm., 14.

yang di duga mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Dengan kata lain, proses penegakan hukum lingkungan dapat timbul atas inisiatif orang sebagai perorangan maupun pengusaha yang dirugikan secara langsung, oleh pihak masyarakat secara berkelompok (*class action*), pihak pemerintah, maupun pihak organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti LSM Lingkungan melalui gugatan atas nama lingkungan hidup.

Class Action penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap “*a mass of people*” yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat:

1. *The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable.*
2. *There are questions of law or fact common to the class.*
3. *The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class.*
4. *The representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.*<sup>2</sup>

Mengenai masyarakat yang merasakan dirugikan oleh perbuatan pihak lain yang di duga mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, hak menggugatnya diatur dalam pasal 37 ayat (1) UUPH yang menetapkan : “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat”. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, hlm., 296-297.

Berdasarkan rumusan Pasal 37 ayat 1 UULH dapat diartikan bahwa gugatan *class action* dalam kasus lingkungan hidup merupakan hak prosedural dari sekelompok masyarakat (*class members*) dalam bentuk gugatan kepengadilan melalui perwakilan kelompoknya (*class representative*), atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu akibat dari perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan tergugat.

Gugatan *class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan (*infuction*) atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban<sup>3</sup>.

Ketentuan itu menunjukkan, bahwa masyarakat yang merasakan dirugikan atas lingkungan hidupnya yang baik dan sehat dapat mengajukan gugatan perwakilan masyarakat (*class action*). Dengan demikian, gugatan perwakilan kelompok merupakan gugatan ganti kerugian dari sekelompok kecil masyarakat yang bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang merasa dirugikan melalui lembaga peradilan. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

1. membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“*schuld*”) dan unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas *tanggunggugat berdasarkan kesalahan* (“*schuld aansprakelijkheid*”), yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran

---

<sup>3</sup> Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, ICEL, PIAC, dan YLBHI, Jakarta, 1997, hlm., 33.

dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.

2. Masalah beban pembuktian ("*bewijslast*" atau "*burde of proof*") yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat (seperti dalam "Tragedi Ajinomoto" di Mojokerto).

Tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan ("*privaatrechtelijk milieurecht*") mengenal asaa tanggunggugat mutlak ("*strick liability*"- "*risico aansprakelijkheid*") yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.

Apabila suatu gugatan memenuhi persyaratan untuk diperiksa secara *class actions* maka pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk penetapan. Sebaliknya apabila gugatan yang dimohonkan tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa menurut prosedur *class actions* maka gugatan tersebut ditolak pemeriksaannya dengan proses pemeriksaan gugatan perwakilan (*class actions*) dan selanjutnya gugatan tersebut akan diperiksa secara gugatan perkara biasa saja.

Apabila *class action* tidak menyangkut tuntutan uang (*monetary damages*) dan hanya mengajukan permintaan deklaratif atau *injuction*, pemberitahuan (*notice*) terhadap anggota kelompok (untuk mendapatkan rekonfirmasi) tidak perlu dilakukan. Namun apabila tuntutan menyangkut ganti rugi dalam bentuk uang, pemberitahuan kepada

masyarakat atau masing-masing anggota kelompok untuk mengambil sikap (*opt in* atau *opt out*) harus disampaikan<sup>4</sup>.

Ketentuan Pasal 38 UUPH, OLH yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan harus memenuhi persyaratan: berbadan hukum atau yayasan, dan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan. Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN – "izin") di bidang lingkungan berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan *batal* atau *tidak sah*, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat.

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan gugatan *class action* yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan anatara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan

<sup>4</sup> Ibid, hlm., 35

tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan.

Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan *Class Action* Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia?
2. Bagaimana Permasalahan Prosedur Gugatan *Class Action* Di Dalam Proses Pengadilan?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Gugatan *Class Action***

Gugatan *class action* merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan oleh kelompok masyarakat melalui perwakilannya, atas dasar kesamaan masalah, fakta hukum dan kesamaan kepentingan, untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dari (para) tergugat melalui proses pengadilan perdata<sup>5</sup>. Prosedur gugatan *class action* sebagai suatu cara untuk memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Prosedur ini sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, praktis, cepat dan efisien sebagaimana di atur dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ada karakteristik dari gugatan *Class Action* yang diatur dalam aturan-aturan yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, yang berbeda dengan gugatan perdata biasa :

- a. Bahwa dalam *class action*, para wakil kelompok tidak memerlukan surat kuasa dari para anggota kelompok (*class member*) diatur dalam pasal PERMA No. 1 tahun 2002 ;

- b. Tetapi dalam hal pemberian kuasa dari para wakil kelas kepada kuasa hukum, tetap memerlukan surat kuasa khusus, sama seperti yang diatur dalam HIR dalam gugatan perdata biasa ;
- c. Dalam pasal 5 disebutkan tentang proses sertifikasi, artinya adalah jika gugatan *class action* ini dapat diterima oleh hakim, maka hakim akan menuangkan sah/tidaknya gugatan dalam suatu penetapan pengadilan ;
- d. Setelah mendapatkan penetapan dari hakim, maka kepada penggugat/wakil kelompok diminta untuk mengajukan usul model pemberitahuan atau Notifikasi. Ada 2 jenis notifikasi yang dikenal yaitu notifikasi keluar dan notifikasi masuk. Berdasarkan pasal 8 di Indonesia yang berlaku adalah notifikasi keluar (*option out*) maksudnya orang yang mendaftar dalam notifikasi berarti menyatakan diri keluar dari gugatan ;
- e. Bahwa dalam pasal 10 disebutkan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam PERMA ini maka hal-hal lain akan diatur/mengikuti Hukum Acara Perdata.

Mengenai bagaimana memulai gugatan *Class Action* :

- a. Penentuan anggota kelas
- b. Penentuan wakil kelas
- c. Penentuan kuasa hukum
- d. Menjaga hubungan antara penggugat.

Sedangkan format yang digunakan dalam gugatan *class action* adalah sama dengan format gugatan biasa.

### **B. Tujuan Gugatan *Class Action***

Secara teoritis, makna dan tujuan pokok dari gugatan *class action* pada dasarnya dapat dijelaskan seperti berikut :

- a. Gugatan *class action* bermakna untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan (*repetition*) terhadap permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian karena kasus pencemaran dan/atau perusakan

---

<sup>5</sup> TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, Surabaya, 1999, hlm., 9.

lingkungan hidup. Ini berarti gugatan yang diajukan sekelompok orang melalui gugatan *class action* akan lebih bersifat ekonomis (*judicial economic*) jika dibanding setiap orang mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan *class action* akan menjadi lebih efisien (*judicial cost efficiency*) apabila dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individual dari masing-masing anggota kelompok.

b. Gugatan *class action* memberi akses pada keadilan (*access to justice*) karena beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan.

c. Gugatan *class action* juga mempunyai makna penting dalam upaya pendidikan hukum (*legal education*) dalam masyarakat :

- (1) di satu sisi gugatan *class action* dapat mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat (*class members*) untuk memperoleh keadilan dan lebih berani menuntut haknya melalui jalur pengadilan;
- (2) di sisi lain gugatan *class action* mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- (3) gugatan *class action* juga dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapa

pun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

### C. Keuntungan dan Kerugian *Class Action*

Terdapat beberapa keuntungan/manfaat yang dapat diperoleh apabila mengajukan gugatan menggunakan prosedur *class action*. John Basten Q. C melihat ada lima manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara individual.
2. Memastikan bahwa tuntutan-tuntutan untuk ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan sepiantasnya.
3. Mencegah putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama.
4. Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien
5. Mengembangkan proses penegakan hukum<sup>6</sup>.

Sedangkan *Ontario Law Reform Commission* melihat ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari prosedur *class action*, yakni:

1. mencapai peradilan yang lebih ekonomis
2. memberi peluang yang lebih besar ke pengadilan
3. merubah perilaku yang tidak pantas dari para pelanggan atau orang-orang yang potensial melakukan pelanggaran.

Secara umum ada tiga manfaat yang dapat diperoleh apabila menggunakan prosedur *class action*, yaitu :

1. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*Judicial Economy*)

Bukan rahasia lagi bagi masyarakat bahwa berperkara di pengadilan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme *class action* maka biaya

---

<sup>6</sup> Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm., 4.



perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang akan diterima. Tidak sedikit pihak (individu) yang mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan disebabkan karena mahal biaya perkara dan biaya pengacara. Manfaat secara ekonomis tidak saja dirasakan oleh pengguga namun juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara class action, pihak tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi pengadilan sendiri sangatlah tidak ekonomis jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu dan terus menerus serta dalam jumlah yang cukup besar.

2. Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*)

Mengajukan gugatan secara class action akan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individu-individu. Menggabungkan diri secara bersama-sama akan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang umumnya dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kemampuan (psikologis) dan pengetahuan tentang hukum. Selain itu dalam class action tidak mensyaratkan pengidentifikasian nama sehingga dapat mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelas. *Class action* juga mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten apabila dilakukan gugatan secara individu.

3. Mendorong bersikap hati-hati (*Behaviour Modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran

Pengajuan gugatan secara class action dapat “menghukum” pihak yang terbukti bersalah, bertanggung jawab membayar ganti kerugian dengan jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita korban (dengan cara yang lebih ringkas) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal ini dapat mendorong setiap pihak atau penanggung jawab usaha (swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati. Selain itu dengan sering diajukannya gugatan secara class action diharapkan merubah sikap pelaku pelanggaran sehingga menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam UUPH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPH: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“*onrechtmatigedaad*”).

2. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur *class action* ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur *class action*. Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun

2002 terhadap beberapa kasus *class action* yang sedang atau dalam proses di peradilan sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktek gugatan *class action* di peradilan di Indonesia

#### B. Saran

1. Pengkajian ini menyiratkan betapa pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat. Namun sayangnya, kualitas normatif pengaturan UUPH terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dirasakan kurang kondusif dan signifikan bagi pengembangan kesadaran lingkungan. Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran-perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis. Kenyataan ini menyebabkan korban pencemaran-perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum.
2. Apabila mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (*class members*). *class actions* lebih meringankan penggugat karena dilakukan bersama-sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar*, ELSAM, Jakarta, 2005
- Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, ICEL, PIAC, dan YLBHI, Jakarta, 1997
- Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Binacipta, Bandung, 1991
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986
- TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, Surabaya, 1999

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 23 tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)



**BIODATA PENULIS**



**Nama** : Muhammad Edward Pontoh  
**Tempat tanggal lahir** : Dili, 02 Februari 1993  
**Alamat Rumah** : Jl. Gunung Bale No. 5  
**Alamat E-mail** : - [edho\\_soul@yahoo.co.id](mailto:edho_soul@yahoo.co.id)  
- [edwardpontoh93@gmail.com](mailto:edwardpontoh93@gmail.com)  
**No. Telp** : 0852 414 58982